

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU NOMOR 93 TAHUN 2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kebidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan ijin pendirian/pembukaan RA bagi RA yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan,
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif RA pada lampiran Keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendididikan jenjang/jenis RA kepada RA tersebut;
 - Mengingat
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Pendidikan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 5. Peraturan Pemerintah No 27/1990 mengenai Pendidikan Prasekolah.

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Menetapkan KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
 - RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN BURU.
- Memberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan RA, Kepada RA yang Pertama tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan Status TERDAFTAR;
- Nomor Statistik RA (NSM) dan Piagam Pendidikan RA akan diberikan Kedua dalam waktu dekat:
- Ijin tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2012-2013: Ketiga

Keempat

Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;

Kelima

Ijin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

Keenam

Segaia sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ketujuh

Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

Kepala UPTD Kecamatan Batabual;

Kepala RA bersangkutan.